

EPISTEMOLOGI POLITIK HIZBUT TAHRIR DALAM MENEGAKKAN *KHILÂFAH AL-ISLÂMIYYAH*

Sudarno Shobron

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102
E-Mail: ss175@ums.ac.id

Abstract

Hizbut-Tahrir is a transnational Islamic movement which takes the path of non-parliamentary politics to establish an *ad daulah al Islamiyah* which adheres to *khilafiyah al Islamiyya* political system. Political epistemology used is *tatsqif* (coaching and cadre), *tafa'ul* (interact) with the people, thus the people carrying out the teachings of Islam comprehensively in his life, and *istilamu al hukmi* (reception of the power) to implement a practical and comprehensive Islam and preached teaching of *islamiyah* to the whole world. Other than that the *Hizbut-Tahrir* has the concept of political epistemology *inqilabiya* (revolutionary), which applying the teachings of Islam as a whole
Keywords: epistemology *tatsqif*; *tafa'ul*; *istilamu al hukmi*; *inqilabiya*

Abstrak

Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam transnasional yang mengambil jalur politik non parlemen untuk mendirikan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem politik *khilâfah al-Islâmiyyah*. Epistemologi politik yang digunakan adalah *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan, *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya, dan *istilâmu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia. Selain itu Hizbut Tahrir memiliki konsep epistemologi politik *Inqilâbiya* (revolusioner) yakni menerapkan syariat Islam secara *kâffah*.

Kata Kunci: epistemologi *tatsqif*; *tafa'ul*; *istilamu al-hukmi*; *inqilabiya*.

PENDAHULUAN

Hizbut al-Tahrir yang sering disebut Hizbut Tahrir disingkat HT merupakan gerakan Islam yang mengambil jalur politik, sehingga semua gerakannya diorientasikan dengan politik, yakni penerapan sistem politik *khilâfah al-Islâmiyyah*. Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara, menguasai negara dengan cara-cara yang prosedural maupun non-prosedural, bahkan akan membentuk suatu negara baru. Gerakan politik itu muncul karena ada tuntutan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik karena kondisi bangsa yang *stagnan* dan cenderung tidak ada kemajuan. Kehadiran pelaku gerakan yang memberikan motivasi, arah gerakan politik, dan gagasan perubahan merupakan bagian integral, bahkan aktor gerakan menentukan keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari gerakan politik yang di dalamnya mengandung nilai-nilai menjadi daya pikat dan perekat antara semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dari suatu gerakan. Untuk itulah sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat, tangguh, konsisten, dan kokoh memegang prinsip, sehingga akan melahirkan pengikut yang setia pada tujuan gerakan politik.

Gerakan politik Islam memiliki tujuan menerapkan syariat Islam dalam semua segi kehidupan, terutama dalam bidang politik, yakni yang berhubungan dengan *state* (negara), dengan cara mendirikan negara Islam (*ad-daulah al-Islâmiyyah*), melakukan perlawanan terhadap sekularisme dan imperialisme di negara-Negara muslim atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Joel Benin menyebut gerakan politik Islam dengan istilah *political Islam* atau Islam Politik. Menurutnya, gerakan politik Islam mendasarkan gerakannya dengan al-Qur'an, hadis dan teks-teks keagamaan, seperti diungkapkan berikut ini:

“We term the movement...” political Islam” because we regard their core concern as temporal and political. They use the Qur’an, the hadith (reports about the words and deeds of Muhammad and his companions), and other canonical religious texts to justify their stances and action”.¹⁷⁸

Ada beberapa faktor pendorong kelahiran gerakan politik. *Pertama*, sebagai respon atas berbagai problem sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendapatkan solusi secara cepat, akurat dan tepat dari pemerintah. *Kedua*, intervensi kekuatan asing yang ikut campur dalam persoalan internal negara, terutama dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. *Ketiga*, kemiskinan, diskriminasi dan kebijakan oleh pemerintah pusat kepada kelompok muslim. *Keempat*, reaksi atas sistem dan tatanegara yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keyakinan atau ideologi tertentu.

Siti Mutiah Setiawati mencatat ada lima faktor munculnya gerakan politik. *Pertama*, adanya penindasan dari kekuatan asing terutama Eropa yang kemudian digantikan oleh Amerika. *Kedua*, penguasa yang sangat represif, otoriter, korup dan dekat dengan kekuatan asing. *Ketiga*, pergantian prinsip-prinsip Islam dengan paham sekularisme. *Keempat*, pendiskriminasian kelompok muslim oleh pemerintah pusat. *Kelima*, ketika negara sedang menghadapi krisis ekonomi.¹⁷⁹ Setiap gerakan politik Islam akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan penentang, baik datangnya dari dalam negara sendiri maupun dari negara lain yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dengan negara tersebut.

Hampir di semua negara di dunia ini ada gerakan politik atau gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negaranya, menjadi negara merdeka, atau menjadi bagian dari negara tetapi memiliki otonomi khusus untuk mengurus dan menciptakan kesejahteraannya sendiri. Ada gerakan politik yang mendapat dukungan dari dunia internasional, negara tetangganya, negara yang memiliki kesamaan ideologi, rakyat dari negara yang memiliki kesamaan agama, namun ada juga gerakan politik yang tidak mendapat sambutan dari pihak lain. Beberapa gerakan politik di dunia dapat disebutkan, misalnya gerakan politik minoritas muslim di Thailand Selatan, gerakan politik Abu Sayyaf di Philipina, gerakan politik Ikhwanul Muslim di Mesir, Fatah dan Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan Front Keselamatan Islam atau *Front Islamique du Salut* (FIS) di Al-Jazair. Indonesia juga muncul gerakan politik yang akan membentuk Negara Islam (NI), misalnya yang terjadi di Jawa Barat dengan DII/TII, dan di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Beberapa gerakan politik Islam di atas, sesungguhnya memiliki benang merah gerakan yang diperjuangkan sebagai berikut.

1. Terwujudnya negara Islam atau *ad-daulah al-Islâmiyyah*, menggantikan bentuk negara sekuler yang memiliki hubungan kedekatan dengan negara-negara Barat. Pemisahan antara agama dengan negara sebagaimana yang terjadi di negara-negara muslim tidaklah memiliki dasar, karena *din wa daulah* satu kesatuan yang integral.
2. Mengganti sistem pemerintah yang pro Barat dengan sistem Islam, misalnya dengan *khilâfah al-Islâmiyyah*
3. *Mabda'* (ideologi) gerakan politik adalah *Din al-Islamî* (agama Islam) yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Islam merupakan agama yang sempurna, memberikan pedoman dalam kehidupan, baik kehidupan ekonomi, seni budaya, sosial, politik dan ketahanan. Islam tidak memisahkan antara ukhrawi dan duniawi.
4. Gerakan politik Islam bersifat fundamental, sehingga strategi dan *manhaj* yang digunakan sering mengambil jalan kekerasan dan perang untuk merebut *power* (kekuasaan), yang disebut dengan jihad. Kalau sudah masuk wilayah jihad, maka nilainya ibadah, dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim.
5. Penerapan syariat Islam dalam arti sesungguhnya, yakni dalam ranah perdata, pidana dan *akhwâlusy syakhsiiyyah*. Hukum Islam harus diterapkan dan menjadi hukum negara, dengan diyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah akan membawa tata kehidupan sosial akan berjalan dengan baik.

Menurut Musthafa Muhammad Thahhan dalam bukunya *Tahaddiyat Siyâsiyyah Tuwâjih al-Harâkah al-Islâmiyyah*, kemunculan gerakan politik Islam disebabkan oleh *pertama*, rasa percaya diri kaum muslimin dalam kesuksesan untuk meraih kemenangan. *Kedua*, keinginan untuk menyatukan kaum muslimin

¹⁷⁸ Joel Benin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essay From Middle East Report*, (New York: I.B. Tauris Publisher, 1997), hlm. 3-4.

¹⁷⁹ Siti Mutiah Setiawati, *Kekuatan Gerakan Politik Islam di Timur Tengah dari Iran Hingga Aljaazair* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2003), hlm. 6-7.

berdasarkan pemahaman Islam yang jelas. *Ketiga*, membebaskan negeri-negeri Islam dari semua kekuatan dan kekuasaan asing.¹⁸⁰

Selain beberapa gerakan politik di atas, ada fenomena menarik di Indonesia pasca Orde Baru, yakni munculnya gerakan politik non-partai. Gerakan politik ini ada yang sudah lama eksis di Indonesia, namun bergerak di bawah tanah, dan ada gerakan politik baru sebagai suatu bentuk ledakan partisipasi pada era reformasi. Misalnya, Front Pembela Islam (FPI), MMI, Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Jamaah Islamiyah, tidak ketinggalan HTI itu sendiri. Semua gerakan politik ini memiliki tujuan penerapan syariat Islam di Indonesia, dan hal ini merupakan harga mati. Usaha-usaha penerapan syariat Islam dilakukan dengan jalan jihad dalam bentuk melawan kemungkaran-kemungkaran, bahkan dengan jalan kekerasan seperti yang dilakukan oleh FPI. Islam tidak hanya dijadikan dasar atau ideologi gerakan politik yang mengambil jalur di luar sistem pemerintah, tetapi Islam juga dijadikan ideologi partai politik yang berjuang menerapkan syariat Islam dari dalam sistem pemerintah sebagaimana kasus di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memperjuangkan Piagam Jakarta.

Penerapan syariat Islam dalam sistem politik tertentu akan selalu mengalami dinamika, yakni pasang surut, naik-turun, bahkan berliku-liku seiring dengan kondisi yang melingkupinya. HTI sebagai gerakan politik yang akan memperjuangkan diterapkannya *khilāfah al-Islāmiyyah* di Indonesia mengalami pasang surut karena harus berhadapan dengan internal umat Islam, baik yang setuju dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh HTI maupun yang tidak setuju bahkan melawannya. Selain itu ada dinamika lain, yakni berhadapan dengan kekuatan-kekuatan bangsa yang jelas-jelas tidak sepaham dengan HTI, tidak ketinggalan kekuatan global yang terus mengadakan perlawanan setiap gerakan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam fundamental.

HT sebagai gerakan Islam transnasional¹⁸¹ masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian Masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide HT kepada mahasiswa. Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT, memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tingginya yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), misalnya Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.¹⁸² LDK yang dihuni oleh sebagian mahasiswa yang telah menerima ideologi HT, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986.¹⁸³ Muhammad Ismail Yusanto, aktivis Jama'ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada, menjadi salah satu pendiri forum ini, dan forum tersebut menjadi cikal-bakal perkembangan HTI.

Kehadiran HT yang membawa ide, gagasan, dan sistem politik Islam sesuai dengan suasana batin mahasiswa yang sedang mencari solusi dari problem keumatan dan kebangsaan dalam dimensi politik. Secara sosial-politik, umat Islam selalu terpinggirkan, tidak memegang peran-peran strategis dalam negara. Pemerintah pada saat itu memiliki kiat untuk menjinakkan umat Islam, yakni dengan cara menciptakan rasa takut kalau berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, pemberlakuan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi massa dan politik, pengibrian kebebasan kampus dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), menjadi faktor kebangkitan semangat mahasiswa dalam melakukan gerakan-gerakan. Semangat dakwah, jihad, ijtihad dan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang ditawarkan oleh HT menjadi tema menarik bagi mahasiswa. HT datang pada saat yang tepat, dan ide-ide yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan dianggap sesuai kebutuhan pada saat itu, sehingga mudah berkembang ke hampir semua kampus besar di Indonesia.¹⁸⁴ Apalagi tema tentang *ad-Daulah al-Islāmiyyah*

¹⁸⁰ Musthafa Muhammad Thahhan, *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, terj. Salafuddin Abu Sayyid dan Jasiman (Solo: Era Intermedia, 1997), hlm. 34-37.

¹⁸¹ Islam transnasional adalah aliran Islam yang berasal dari luar negeri yang memiliki orientasi gerakan politik dan dakwah masuk ke Indonesia untuk mengembangkan gerakannya itu, misalnya Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Islamiyah, Gerakan Salafi. Lihat, Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

¹⁸² *Majalah Sabili*, No.9 Th. X, *Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia*, 2003, hlm. 142-143. Lihat, Zeyno Baran (ed.), *The Challenge of Hizbut Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, Conference Report* ([t.t]: The Nixon Center, 2004), hlm. 11.

¹⁸³ Feriawan A.N., FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/ 2004. Lihat juga, Redaksi, "Wawancara dengan Ismail Yusanto", dalam *Special Report Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/ 2004.

¹⁸⁴ *Ibid.*

(Negara Islam) yang pernah menjadi cita-cita sebagian umat Islam Indonesia, dengan gagasan Negara Islam Indonesia (NII),¹⁸⁵ dinilai sebagai bentuk pengamalan Islam yang *kâffah*, karena sebagian umat Islam berpendapat bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Bahkan bentuk kesultanan Islam di Nusantara (sebelum Indonesia Merdeka) yang telah ada di Indonesia, dan diyakini memiliki hubungan dengan kekhalifahan pada masa Abbasiyah.¹⁸⁶

HT hadir di 48 negara di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia ingin merubah sistem pemerintah dan bentuk Negara dengan sistem *Khilafah al-Islamiyah* dan bentuk Negara *Daulah Islamiyah* atau *Daulah al-Khilafah*. Akhirnya melahirkan suatu pertanyaan “*bagaimana epistemologi politik Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah Islamiyah*”?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan historis atau *historical approach*¹⁸⁷, yakni penelitian yang berusaha melihat sejarah masa lampau secara kritis dan kronologis. Pendekatan historis menurut Teuku Ibrahim Alfian,¹⁸⁸ bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu (1) pengumpulan obyek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan; (2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik; (3) mengumpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik; (4) menyusun kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti. Proses kerja pendekatan historis dalam penelitian ini adalah *heuristik* (mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah), *critics* (menilai otentisitas dan kredibilitas tidaknya suatu sumber), *auffassung* (sintesis fakta yang diperoleh melalui kritik sumber), dan *darstellung* (penyajian dalam bentuk tertulis).

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi,¹⁸⁹ yakni buku-buku,¹⁹⁰ buletin (*Al-Islam*), majalah (*al-Wa'ie*), tabloid Media Umat, maupun pernyataan resmi organisasi, sebagai data primer. Sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh orang dalam HT sendiri maupun dari luar merupakan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan induktif interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir (HT) telah mentahbiskan dirinya sebagai *political movement* (الحركة السياسية), yang memiliki *fikrah* dan *thariqah* (epistemologis) sehingga semua pemikiran, gerakan dan orientasinya adalah politik. Ada dua jenis gerakan politik, yakni gerakan politik parlemen, dan gerakan non parlemen. Gerakan politik parlemen dapat melakukan legislasi, pengawasan dan penentuan kebijakan politik secara langsung, dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan gerakan politik non-parlemen hanya dapat melakukan pengawasan dari luar sistem dalam rangka untuk mempengaruhi jalan dan arah kebijakan pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, dan dalam rangka memperjuangkan nasibnya sendiri dan komunitasnya, walaupun sering juga memperjuangkan kehendak yang menjadi hajat orang banyak.

Gerakan politik non-parlemen membutuhkan massa yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama untuk memberikan tekanan kepada orang dan kelompok lain, sehingga kalau ada kepentingan yang sama, gerakan politik ini dapat bekerjasama, tetapi kalau tidak ada kepentingan yang sama, mereka berjalan menurut agendanya masing-masing. HTI di Jawa Timur dapat bekerjasama dengan elemen gerakan politik Islam lain untuk melakukan demonstrasi menolak kedatangan Barack Obama, presiden AS ke Indonesia. Mereka menilai Obama tidak berbeda dengan presiden Amerika lainnya yang selalu melakukan intervensi ke negara muslim.

¹⁸⁵ Negara Islam Indonesia (NII) dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Cianjur Jawa Barat pada tahun 1949, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Aceh dan Sulawesi Selatan melalui Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) yang dipimpin oleh Kahar Muzakir. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Alfabeta, 2004), hlm. 83.

¹⁸⁶ Anonim, *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).

¹⁸⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng, 1995), hlm. 17. Periksa juga, Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 1.

¹⁸⁸ Teuku Ibrahim Alfian, *Metode dan Metodologi Sejarah*, makalah, [t.th.], hlm.1-2.

¹⁸⁹ Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45. Lebih jauh Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa bahan-bahan dokumen itu meliputi (1) otobiografi; (2) surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memoar; (3) surat kabar; (4) dokumen-dokumen pemerintah; (5) cerita roman dan cerita rakyat.

¹⁹⁰ Buku-buku resmi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir antara lain:

(1) مفاهيم حزب التحرير ;
(2) نظام الإسلام (5) ; الدولة الإسلامية (4) ; التكتل الحزبي (3) ; مفاهيم سياسة لحزب التحرير (2)
(6) أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة

Tepatlah suatu pernyataan bahwa dalam politik tidak ada lawan sejati dan tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan bersama. Ideologi politik juga tidak begitu penting, karena sering kerjasama politik tidak mempertimbangkan ideologi. Walaupun ideologinya berbeda bahkan bertentangan, tetapi kalau ada kepentingan bersama, maka kerjasama dapat dilaksanakan. Kepentingan bersama itu adalah kekuasaan (*power*), baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah politik, tidak terkecuali Hizbut Tahrir akan melakukan kerjasama dengan organisasi mana pun kalau memang ada kepentingan atau kemanfaatan yang dapat diambil.

HT bukan kelompok yang bersandar pada aspek spiritual, gerakan ilmu atau lembaga ilmiah, sosial, amal, ekonomi, lembaga pendidikan,¹⁹¹ apalagi gerakan tajdid. Maka tidak akan dijumpai dalam masyarakat HT melakukan kegiatan-kegiatan *research and development (R & D)*, mendirikan sekolah, perguruan tinggi, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan saat sekarang dan masa depan dibutuhkan lembaga yang serius sebagai gerakan ilmu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari belahan negara lain. Namun karena itu merupakan pilihan yang diambil oleh setiap gerakan Islam, dan memiliki dasar yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis, maka tidak dapat disalahkan, justru kalau memungkinkan melakukan sinergi dengan gerakan Islam yang memiliki orientasi berbeda. Sinergi diantara gerakan Islam apapun orientasinya sangat dimungkinkan, karena diantara gerakan Islam tidak ada perbedaan secara fundamental, bahkan yang dijadikan dasar gerakan adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Walaupun kadang secara teologis ada perbedaan, tetapi itu masih dalam batas-batas yang wajar, karena adanya perspektif yang berbeda. Tetapi kalau perbedaan teologis ini didialogkan, sangat mungkin dapat mendekatkan perbedaan.

Nash atau dalil yang digunakan sebagai dasar atau motivasi lahirnya HT persis sama dengan Muhammadiyah, yakni Q.S.Ali Imran/3:104,¹⁹² tetapi dipahami secara berbeda dapat melahirkan jenis aktivitas dan amal usaha yang berbeda pula. HT dengan dalil yang sama melahirkan gerakan politik dengan memperjuangkan perwujudan *ad-daulah al-Islamiyyah* dalam rangka untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Kata *وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ* menurut HT dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar membentuk suatu kelompok (*jama'ah*) dalam bentuk partai politik yang bertugas melakukan dakwah amar makruf nahi munkar kepada para penguasa agar berbuat ma'ruf, dan memberikan nasehat agar tidak berbuat munkar. Ayat ini oleh HT dijadikan dasar akan kewajiban mendirikan partai politik Islam atau partai Islam, yakni suatu partai yang berasaskan akidah Islam, mengambil dan menetapkan sesuatu berdasarkan hukum-hukum Islam, dan memecahkan problem-problem dengan mengikuti *tariqah* Rasulullah saw.¹⁹³

Menurut HT bahwa yang dimaksud politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat Islam. Negara memiliki tugas dan fungsi menentukan kebijakan politik dan melaksanakan kebijakan itu secara nyata, sedangkan umat memiliki tugas dan fungsi melakukan kontrol terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.¹⁹⁴ Baik negara maupun umat yang melaksanakan fungsi-fungsi politik tetap berada dalam bingkai penerapan ideologi (*mabda'*), sehingga kebijakan dalam negeri maupun luar negeri tidak keluar dari *mabda'* tersebut, bahkan menyebarkan ideologi ke luar negeri menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya. HT melakukan hubungan dengan berbagai negara, bangsa dan umat lain membawa misi yakni mendakwahkan Islam, bukan hanya sekedar hubungan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan oleh banyak negara.

Berpijak dari itu semua, maka Hizbut Tahrir memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni: (1) Melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan memberikan solusi problem-problem keumatan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Dengan kata lain tujuan HT adalah mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islam di *dâru'l Islâm* dan di dalam masyarakat Islam; (2) b. Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, pola pikir yang cemerlang. *Hizb* berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaannya, mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa dunia, seperti yang telah terjadi masa silam, dan memimpinya

¹⁹¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm. 3.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 4. Lihat Q.S.Ali Imran/3: 104 tersebut adalah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^{١٤}

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

¹⁹³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan...*, hlm. 5-8.

¹⁹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj. M.Shiddiq al-Jawi (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), hlm. 7.

sesuai dengan hukum-hukum Islam; (3) c. Menyampaikan *hidâyah* (petunjuk syariat) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang ide-ide dan sistem perundang-undangan kufur maupun kekufuran itu sendiri secara menyeluruh, sehingga Islam dapat menyelimuti seluruh dunia.¹⁹⁵

Semua tujuan tersebut dibangun di atas akidah Islam, berusaha menyadarkan umat Islam kembali kepada syariat Allah, kembali hidup di bawah naungan *ad-daulah al-Islâmiyyah*, yang semua kehidupannya diatur oleh hukum-hukum Islam secara *kâffah*, sehingga masa kejayaan dan keemasan umat Islam di dunia dapat diraih kembali. Oleh karena itu, HT merupakan gerakan politik dunia yang ingin meraih kejayaan kembali seperti pada masa Khulafaurrasyidin sebagai *khilâfah* pertama, dan akan hadir lagi sebagaimana dijanjikan dalam *khilâfah Râsyidah* kedua. Digambarkan oleh Hamid Fahmi Thaib dalam kitabnya "*al-Khilâfah ar-Râsyidah al-Maw'udah wa at-Tahadiyat*" bahwa berdirinya kembali *khilâfah Râsyidah* kedua akan terjadi goncangan dahsyat, persis seperti apa yang terjadi saat berdirinya *ad-daulah al-Islâmiyyah* pertama, karena gaungnya akan meliputi seluruh manusia yang ada di bumi ini.¹⁹⁶ Dikatakan akan terjadi goncangan ini dapat dipahami, karena (1) *Khilâfah al-Islâmiyyah* telah hilang dari praktek politik Islam di seantero dunia; (2) Negara-negara Islam atau negara Muslim telah mapan dengan sistem pemerintah dan bentuk negara, baik yang republik maupun yang monarkhi; (3) Contoh ideal bentuk negara *khilâfah* masih dalam perdebatan; dan (4). Kehadiran *khilâfah al-Islâmiyyah* bisa jadi bertentangan dengan sistem pemerintah yang telah teruji dalam sejarah dunia.

Kehadiran suatu sistem yang baru ke dalam negara yang telah memiliki sistem akan membawa dua dampak, yakni ditolak, dan atau diterima. Oleh karena itu, tujuan HT untuk menegakkan kembali *khilâfah al-Islâmiyyah* akan membutuhkan waktu yang panjang, dan bisa jadi mengalami benturan-benturan, baik dari sisi konsep maupun implementasinya dalam suatu negara. Menurut HT benturan-benturan itu sesuatu yang wajar, karena suatu negara yang telah mapan dengan ideologi, sistem dan bentuk pemerintahan tidak mudah untuk diganti. Padahal HT dalam melakukan perubahan tidak setengah-setengah, tetapi dengan revolusioner (*inqilâbiya*).

Epistemologi politik HT untuk mewujudkan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem *khilâfah* adalah agar memudahkan melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Dakwah yang dilakukan oleh penguasa akan lebih efektif dibandingkan oleh yang tidak memiliki kekuasaan. Penguasa memiliki *power* dapat menyusun undang-undang atau *dustûr* atau *qanûn* dapat disusun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan syariat Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam setiap hukum akan disertai dengan sanksi bagi mereka yang tidak mematuinya. Ini merupakan kesempatan untuk dapat melaksanakan ajaran Islam secara *kâffah* dan mendakwahkan ke seluruh dunia.

Ada dua tahapan dalam melakukan perubahan politik yakni *pertama*, tahap pengajaran, pembinaan, penyiapan pemikiran dan ruhiyah. Tahap ini ada dua strategi yaitu pemahaman pemikiran dan kristalisasi ide-ide ke dalam pribadi-pribadi, dan pembentukan *kutlah* (kelompok) dakwah berdasarkan pemikiran tersebut. *Kedua*, tahap penyebaran dakwah dan perjuangan dengan cara melakukan transfer pemikiran ke dalam obyek dakwah, sehingga pemikiran tersebut dapat diterapkan ke dalam kehidupan nyata, karena tidak ada artinya suatu pemikiran kalau tidak diwujudkan.¹⁹⁷ Dua tahapan dakwah ini sesuai dengan dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah saw sewaktu di Mekah, yakni tahapan pembentukan *kutlah* yakni mengajak manusia untuk memeluk Islam, membina dan membimbing mereka untuk tunduk dan taat kepada hukum-hukum Islam secara rahasia, dan selanjutnya tahap dakwah terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy.

Epistemologi politik HT mengikuti epistemologi dakwah Rasulullah saw, karena beliau adalah contoh teladan yang baik (Q.S. al-Ahzab/33: 21). HT menerapkan operasionalisasi dakwah Rasulullah saw yang dibagi dalam tiga tahap, yakni:

1. Epistemologi *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Pada tahap ini, dakwah dilakukan dengan mengundang orang-orang datang ke rumah, dan pada saat lain Rasulullah saw mendatangi orang-orang ke rumah, mengajak mereka masuk Islam, membangun keimanan dan pemahaman akan makna kalimat tahlil.
2. Epistemologi *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya. Pada tahap ini ada perjuangan politik, karena berhadapan dengan pemimpin kafir Quraisy yang secara sosiologis telah mapan dalam masyarakat, dan secara teologis telah memiliki

¹⁹⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi...*, hlm. 25-26.

¹⁹⁶Hamid Fahmi Thaib, *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, terj. Yahya AR (Jakarta: HTI Press, 2008), hlm. 13.

¹⁹⁷Taqiuddin an-Nabhani, *Daulah Islamiyah*, terj.:Umar Faruq dkk. (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 37.

keyakinan sendiri. Dakwah dalam tahap kedua penuh dengan perjuangan dan dinamika, karena tidak mudah mengubah masyarakat yang terbelenggu oleh kekuasaan dan keyakinan tradisional.

3. Epistemologi *istilâmu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia.¹⁹⁸

Epistemologi politik HT untuk meraih kekuasaan dengan mendirikan partai politik yang benar, yakni menempuh delapan belas langkah untuk mendirikan partai ideologis yang benar dalam meraih kekuasaan. Dakwah yang dilakukan HT untuk meraih kekuasaan, maka dakwah hanya sebagai cara atau strategi politik.

Selain tiga jenis epistemology politik HT di atas, ada epistemology politik yang lain, yakni epistemologi politik *Inqilâbiya*. Epistemologi ini oleh HT bukan dipahami dengan kudeta politik, HT dalam penerapan ideologi Islam juga dengan revolusioner (*inqilabiya*), namun bukan revolusi yang dipahami selama ini, yakni mengambil kekuasaan dengan melakukan kudeta, paksaan, dan selalu menelan korban rakyat yang tidak perlu. Revolusioner menurut HT merupakan terjemahan dari *inqilabiya*, sebagaimana yang tertera dalam kitab *at-takatul al-hizb* berikut ini:

وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لَا تَقْبَلُ الْإِشْتِرَاكَ فِي الْحُكْمِ مَجْرَئًا , بَلْ تَأْخُذُ الْحُكْمَ كُلَّهُ , وَتَتَّخِذُ طَرِيقَةً لِتَطْبِيقِ الْمَبْدَأِ , وَلَيْسَ غَايَةً . وَتَنْفُذُ الْمَبْدَأَ الْإِسْلَامِي تَنْفِيزًا إِنْقِلَابِيًّا , وَلَا تَقْبَلُ طَرِيقَةَ التَّدْرِيجِ مَهْمَا كَانَتْ الطَّرُوفُ .¹⁹⁹

Maksud dari pernyataan Taqiyuddin di atas adalah metode revolusioner tidak membolehkan partai bergabung dengan pemerintah yang menerapkan hukum Islam secara parsial, tetapi partai harus menerapkan hukum secara *kâffah*, dan metode ini untuk menerapkan *mabda'* bukan sebagai tujuan perjuangan. Metode ini mengharuskan penerapan ideologi (*mabda'*) Islam secara revolusioner (*inqilabiya*), tidak membolehkan penerapan *mabda'* secara bertahap, walaupun dalam keadaan bagaimana pun. Lantas revolusioner yang dimaksud oleh Taqiyuddin itu apakah melakukan kudeta sebagaimana yang sering terjadi dalam beberapa negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam? Jawaban ini telah diberikan oleh Muhammad Ismail Yusanto, jurubicara HT Indonesia. Menurutnya, *inqilâbiyâ* lawan dari *islâhiyah*. *Inqilâbiyâ* perubahan yang mendasar dalam segala aspek, seperti rumah bangunan yang baru, tidak hanya mengganti catnya. *Inqilâbiyâ* terjemahnya revolusioner, tapi berbeda dengan kudeta. *Inqilâbiyâ* ada dalam kitab *mafahim hizbut tahrir litaghyir*. Sedangkan menurut Ustadz Sarwidi, humas HT Indonesia untuk Solo Raya, revolusioner yang dimaksud oleh HT adalah melaksanakan ajaran Islam secara *kâffah*, menyeluruh, totalitas, tidak separoh-paroh. Diibaratkan seperti membalikkan suatu keadaan 180 derajat sekaligus, tidak melalui tahapan 10 derajat, kemudian 30 derajat, dan seterusnya.

Pernyataan dua tokoh HT dari pusat dan daerah tersebut menunjukkan bahwa HT tidak akan melakukan kudeta di Indonesia, tetapi akan melakukan perubahan-perubahan mendasar ke arah pelaksanaan syariat Islam yang *kâffah*. Semua sistem yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dirubah sesuai dengan syariat Islam. Untuk itulah tidak ada yang dikhawatirkan dari perjuangan HT, karena apa yang diperjuangkan oleh HT memiliki kesamaan dengan gerakan Islam lainnya, yang berbeda hanya strateginya, sementara muatan materi perubahan dapat dikatakan sama.

Alasan tidak akan melakukan kudeta itulah salah satu sebab yang menjadikan HT aman-aman saja bergerak di Indonesia. Rupanya pemerintah melakukan pembiaran terhadap HT, karena merasa tidak membahayakan bagi bangsa dan negara. Namun harus diingat dan jangan sampai pemerintah lengah, walaupun HTI tidak memiliki senjata dan kekuatan militer, tetapi HT memiliki kekuatan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Sinergi kekuatan sosial yang dimiliki oleh HT dengan kekuatan lainnya akan dapat membahayakan stabilitas nasional. Tunisia hancur, bukan karena militer, tapi karena gerakan sosial yang dilakukan oleh semua kekuatan untuk menjatuhkan presiden, dan ternyata berhasil. Ingat, pengalaman adalah guru yang sangat baik dan berharga, jangan jatuh pada lubang yang sama.

KESIMPULAN

¹⁹⁸Syabab Hizbut Tahrir, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj. M.Ramdhan Adi (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm. 118-130. Lihat juga, Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm.42-43.

¹⁹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Takattul al-Hizbi* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), hlm. 54.

Berpijak dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang epistemology politik Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah al-Islamiyah, adalah:

1. Hizbut Tahrir merukan gerakan politik Islam non parlemen yang akan mendirikan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem politik *khilâfah al-Islâmiyyah*.
2. Ada tiga epistemology politik HT untuk mengakkan *Khilâfah al-Islâmiyyah*, yakni *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya, dan *istilâmu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia.
3. Epistemologi politik *Inqilâbiya* (revolusioner) yakni tidak bergabung dengan pemerintah yang menerapkan hukum Islam secara parsial, tetapi partai harus menerapkan hukum secara *kâffah*.
4. Epistemologi politik HT tersebut mencontoh epistemologi dakwah Rasulullah saw sewaktu masih berada di Mekkah dan di Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: logos Wacana Ilmu.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsul Rizal Penggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Alfabet.
- Anonim. 2009. *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- A.N., Feriawan. 2004. FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/2004.
- Baran, Zeyno (ed.). 2004. *The Challenge of Hizbut Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, Conference Report*. [t.t]: The Nixon Center.
- Benin, Joel and Joe Stork (ed.), 1979. *Political Islam Essay From Middle East Report*. New York: I.B. Tauris Publisher.
- Kartodirdjo, Sartono. 1989. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Majalah *Sabili*, No.9 Th. X. 2003. *Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia*.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj. M.Shiddiq al-Jawi. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- _____. 2009. *Daulah Islamiyah*, terj.:Umar Faruq dkk. Jakarta: HTI Press.
- _____. 2001. *Al-Takattul al-Hizbi*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Redaksi. 2004. "Wawancara dengan Ismail Yusanto", dalam *Special Report Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1
- Setiawati, Siti Mutiah. 2003. *Kekuatan Gerakan Politik Islam di Timur Tengah dari Iran Hingga Aljazair*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Tahrir, Hizbut. 2009. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- _____. 2009. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Tahrir, Syabab Hizbut. 2008. *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj. M.Ramadhan Adi. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Thahhan, Musthafa Muhammad. 1997. *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, terj. Salafuddin Abu Sayyid dan Jasiman. Solo: Era Intermedia.
- Thaib, Hamid Fahmi. 2009. *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, terj. Yahya AR. Jakarta: HTI Press.
- Za'rur, Abu. 2009. *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman. Bogor: Al-Azhar Press.